

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, di masa pandemi Covid. 19 ini kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2020. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders.

Tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 31 Januari 2021

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

LALU FIRMAN WIJAYA, ST.,MT
NIP. 19700504 200003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD	1
I.2. DATA KEPEGAWAIAN	2
I.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	3
BAB II.....	4
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
II.1. RENCANA STRATEGIS	4
II.1.1. Tujuan.....	5
II.1.2. Sasaran	5
II.1.3. Strategi dan Kebijakan	7
II.1.4. Program dan Kegiatan.....	8
II.2. PERJANJIAN KINERJA OPD 2020.....	10
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
III.1 SKALA PENGUKURAN EVALUASI KINERJA	13
III.2 EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN SASARAN	14
III.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	24
III.3.1. Analisis Efisiensi SDM dan Aset.....	24
III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
BAB IV.....	31
P E N U T U P	31
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) juga sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menuju terwujudnya **Good Governance** yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2016-2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	%
1.	Rasio ketersediaan debit air irigasi	Debit air (Ls)	23.108	23.108	100
		Cakupan Layanan Irigasi (Ha)	13.123	13.123	100
2.	Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase jalan dalam kondisi baik	74,32	67,552	90,89

3.	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	Persentase Rumah tangga yang terlayani air bersih	80	78,16	97,7
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW)	84.36	81,04	96,06
5.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR)	B	C	C

Dari ilustrasi table diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis

1. Sasaran rasio ketersediaan debit air irigasi dengan indikator Debit air dengan target di tahun 2020 sebesar 23.108 L/s dengan realisasi sebesar 23.108 L/s dengan capaian kinerja sebesar 100%, ini dikarenakan kita akan mempertahankan jumlah debit air irigasi yang tersedia sesuai alokasi air dari BWS Nusa Tenggara I/ Jumlah Debit pada Semua Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten (69 DI). Sedangkan untuk indikator
2. Cakupan layanan irigasi dengan target 2020 sebesar 13.123 Ha dengan realisasi sebesar 13.123 Ha, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dimana realisasinya tidak mengalami peningkatan dan penurunan dikarenakan kita mempertahankan luas areal Cakupan Layanan Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
3. Sasaran meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik dengan indikator Persentase jalan dalam kondisi baik dengan target di tahun 2020 sebesar 74,32% dari target tersebut hanya bisa terealisasi sebesar 67,55%, dengan capaian kinerja sebesar 90,89%, di tahun anggaran 2020 tidak bisa mencapai target ini di dikarenakan pada tahun anggaran 2020 hanya bisa menangani pemeliharaan rutin jalan sepanjang 228,05 Km sedangkan untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan tidak bisa dilaksanakan, karena adanya rasionalisasi anggaran/refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid.19, sehingga beberapa kegiatan harus ditunda pelaksanaannya.

4. Sasaran meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih dengan indikator persentase rumah tangga yang terlayani air bersih dimana untuk target tahun 2020 sebesar 80% dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 sebesar 78,16%, untuk realisasi capaian kinerja tahun 2020 belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh permasalahan yang sama yaitu adanya rasionalisasi anggaran/refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid.19.
5. Sasaran Ketaatan terhadap RTRW dengan indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW dengan realisasi tahun 2020 sebesar 81,04% dari target tahun 2020 sebesar 84.36% sehingga prosesntase realisasinya menjadi 96,06%, ini artinya tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 1). Kurangnya sosialisasi, 2). Kesadaran masyarakat terhadap informasi tata ruang, dan adanya rasionalisasi anggaran/refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid.19.
6. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan dengan indikator Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR) dimana target tahun 2019 dengan nilai B tapi realisasinya masih C hal ini disebabkan karena masih kurang sinkronnya antara laporan dengan data pendukung yang dilampirkan. Cara yang harus dilakukan untuk merealisasikan capaian sesuai target adalah dengan meningkatkan kualitas laporan.

Dari data capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis di tahun anggaran 2020 masih ada indikator yang belum mencapai target itu disebabkan karena dampak dari pandemic Covid 19, dimana yang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini ialah kesehatan dan kebutuhan pokok rakyat, di mana pemerintah melakukan rasionalisasi dengan realokasi anggaran/refocusing anggaran untuk penanganan Covid. 19 sehingga beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mengalami penundaan pelaksanaanya.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

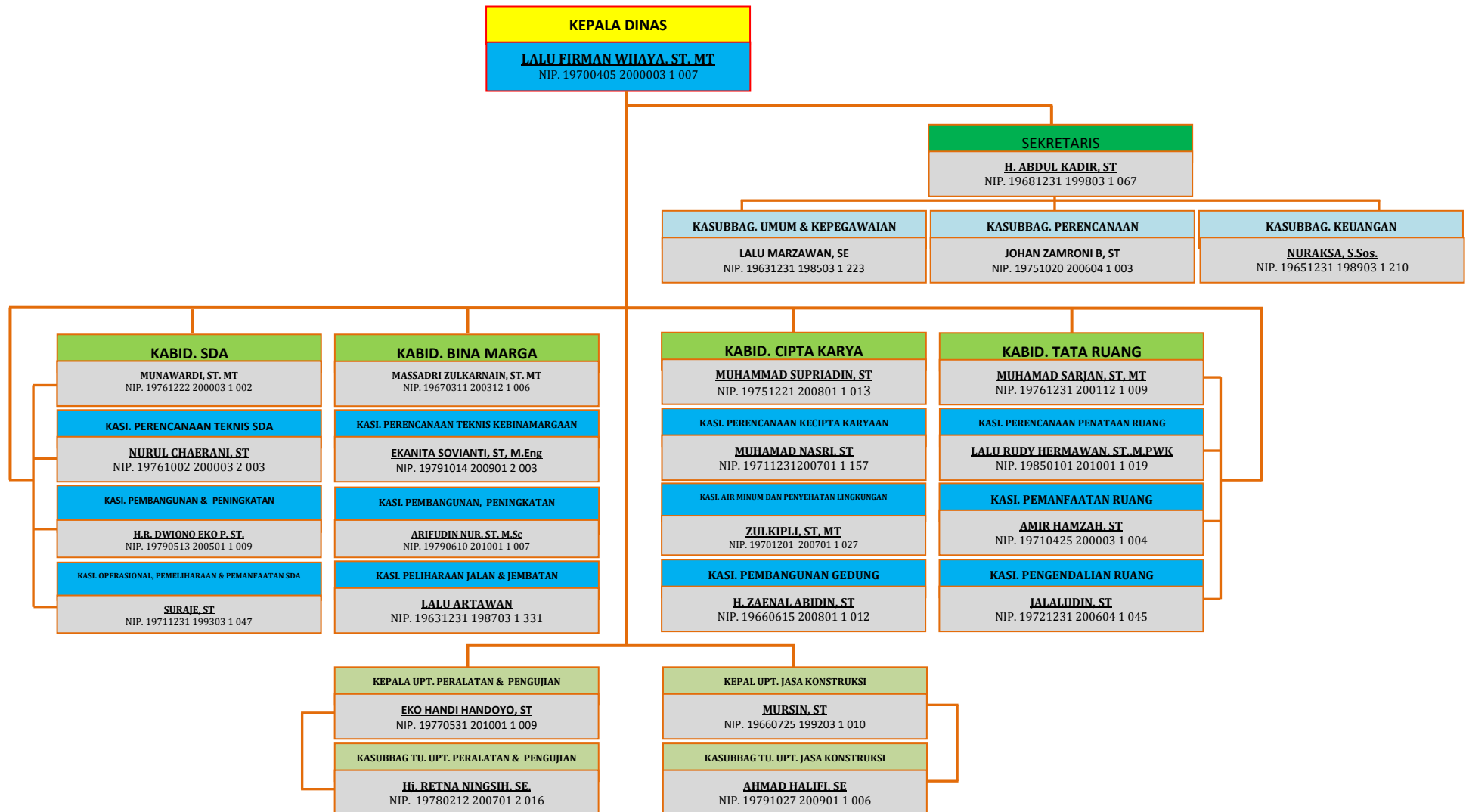
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

I.2. DATA KEPEGAWAIAN

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	a. II. b	1
	b. III. a	1
	c. III.b	4
	d. IV. a	17
	e. IV.b	2
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	a.	-
	b.	-
	c.	-
3.	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV	3
	b. III	63
	c. II	163
	d. I	24
4.	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S3	0
	b. S2	13
	c. S1/DIV	39
	d. SM / D.I / D.III	1
	e. SMA Sederajat	160
	f. SMP Sederajat	23
	g. SD Sederajat	17

I.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah : “ Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman sejahtera dan bermutu”

Untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021 , terkait erat dengan pencapaian misi ke 3, 4 dan 5 , yaitu :

1. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi dengan dukungan stabilitas kamtibmas
2. Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum. dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

II.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samapai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasrkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan antara faktor kunci keberhasilan dengan misi Kepala Daerah, maka dirumuskan 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Terwujudnya layanan irigasi yang optimal
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pembangunan
3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

II.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Rasio ketersediaan debit air irigasi
2. Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik
3. Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih
4. Ketaatan terhadap RTRW
5. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2016-2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya layanan irigasi yang optimal	Rasio ketersediaan debit air irigasi	Cakupan layanan Irigasi
		Debit Air
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pembangunan	Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase jalan dalam kondisi baik
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	Rumah tangga yang terlayani air bersih
	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP SKPD

II.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan Efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

III.2 Sasaran 1 : Rasio ketersediaan debit air irigasi

- Strategi : - Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana infrastruktur irigasi serta peningkatan operasional rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
- Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
- Kebijakan : - Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan meningkatkan kinerja OP
- Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan sumber daya air

2. Sasaran 2 : Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik

- Strategi : - Pembangunan dan peningkatan pemeliharaan Jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap
- Kebijakan : - Mempertahankan dan meningkatkan Kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun

3. Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih

- Strategi : - Terpenuhinya kebutuhan akses air bersih

- yang memadai dan berkualitas
- Kebijakan : - Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana air bersih
4. Sasaran 4 : Ketaatan terhadap RTRW
- Strategi : - Terkendalinya pemanfaatan ruang oleh masyarakat
 - Kebijakan : - Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam Pengendalian pemanfaatan ruang
5. Sasaran 5 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan
- Strategi : - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang lebih baik
 - Kebijakan : - Meningkatkan akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan

II.1.4. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.4. Penyediaan Perlengkapan Kantor 1.5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4.1. Perencanaan pembangunan jalan 4.2. Pembangunan Jalan 4.3. Perencanaan Pembangunan Jembatan 4.4. Penyusunan sitem informasi/data base jalan	
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan 5.1. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan 5.2. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 5.3. Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin jalan 5.4. Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan 5.5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan 5.6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	
6.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Runag 6.1. Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Ruang 6.2. Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian, Pemanfaatan Ruang 6.3. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7.1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 7.2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 7.3. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 7.4. Pemberdayaan petani pemakai air	
8.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 8.1. Pembangunan Gedung Kantor	

9	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum 9.1. Penyediaan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat 9.2. Perencanaan Pengembangan Keciptakryaan	
---	---	--

II.2. PERJANJIAN KINERJA OPD 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan tahun ke 4 (empat) Renstra 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Capaian kinerja tahun 2020 mencerminkan capaian Renstra 2016-2021. Pernjanjiaan kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LALU FIRMAN WIJAYA, ST.MT.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. MOH. SUHAILI FT**

Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 7 Januari 2020

Pihak Kedua

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA, ST.MT.

NIP. 19700504 200003 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

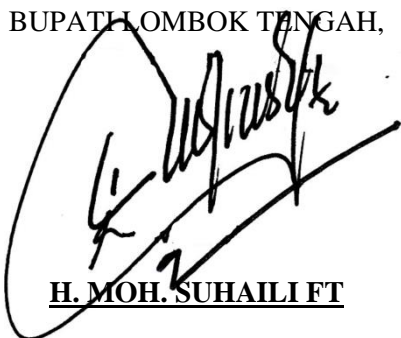
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Rasio ketersediaan debit air irigasi	Cakupan/luas layanan daerah irigasi kewenangan Kabupaten (Ha)	13,123.35 Ha
2.	Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi Mantap	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik/mantap	74,32 %
3.	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	Persentase Rumah tangga yang terlayani air bersih	80%
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	84.36%
5.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR)	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.433.105.050
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 342.600.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp. 245.841.000
4.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 63.438.937.860
5.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 6.246.543.500
6.	Program Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 637.773.500
7.	Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp. 19.339.932.550
8.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Rp. 107.211.766.240
9.	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Rp. 22.750.550.000

Praya, 7 Januari 2020


Pihak Pertama

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHAILI FT

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LALU FIRMAN WIJAYA, ST.MT.
NIP. 19700504 200003 1 007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 SKALA PENGUKURAN EVALUASI KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Realisasi}) - (\text{Realisasi Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	Baik Sekali
2.	Nilai 86 s.d 100	Baik
3.	Nilai 71 s.d < 85	Sedang
4.	Nilai 56 s.d < 70	Kurang
5.	Nilai < 55	Sangat Kurang

III.2 EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perubahan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

III.2.1. Sasaran 1 : Rasio ketersediaan debit air irigasi

Sasaran No. 1 tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

- a. Debit air
- b. Cakupan Layanan Irigasi

III.2.2. Sasaran 2 : Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan 1(satu) indikator kinerja sasaran yaitu :

- a. Persentase jalan dalam kondisi baik

III.2.3. Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih

Sasaran No. 3. tersebut diukur dengan 1(satu) indikator kinerja sasaran yaitu :

a. Rumah tangga yang terlayani air bersih

III.2.4. Sasaran 4 : Ketaatan terhadap RTRW

Sasaran No.4. tersebut diukur dengan 1(satu) indikator kinerja sasaran yaitu :

a. Persentase Ketaatan terhadap RTRW

III.2.5. Sasaran 5 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan

Sasaran No.5. tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu :

a. Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR)

Capaiannya dapat dilihat pada tabel - tabel berikut ini :

Tabel III.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No. 1 (satu) Tahun 2020

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi tahun sebelumnya		Target akhir Renstra	Sumber Data
						2018	2019		
1.	Debit Air	L/s	23.108	23.108	100	23.108	23.108	23.108	Bidang SDA
2.	Cakupan Layanan Irigasi	Ha	13.123	13.123	100	13.123	13.123	13.123	Bidang SDA
Rata-Rata						Kriteria Tahun 2020 : Baik			

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Rasio ketersediaan debit air irigasi dengan indikator yaitu Debit Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan capaian kinerja 100% dengan kriteria Baik

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut :

- Indikator Debit Air

Capaian indikator debit air tahun 2020 dengan realisasi sebesar 23.108 L/s dengan target 23.108 L/s untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 tidak mengalami perubahan yaitu dengan capaian sebesar 23.108 L/s dengan target awal 2016 sampai dengan target akhir tahun 2021 sebesar 23.108 L/s . Untuk mencapai target kinerja dilakukanlah usaha mempertahankan debit air irigasi yang tersedia sesuai

alokasi air dari BWS Nusa Tenggara I/ Jumlah Debit pada Semua Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten (69 DI).

- Indikator Cakupan layanan irigasi

Capaian indikator Cakupan Layanan Irigasi tahun 2020 dengan realisasi sebesar 13.123 Ha dari target 13.123 Ha, sedangkan capaian indikator cakupan layanan irigasi tahun 2018 dan 2019 tidak ada perubahan realisasinya yaitu sebesar 13.123 Ha sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu target awal 2016 sampai dengan target akhir 2021 sebesar 13.123 Ha, ini dikarenakan kita akan mempertahankan luas areal daerah irigasi /cakupan layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dapat terlayani air irigasi yang tersedia.

Yang harus di lakukan untuk mempertahankan capaian kinerja dengan indikator cakupan layanan irigasi yakni dengan disusunnya Peraturan Bupati tentang rencana pola tanam dalam rangka pembagian air irigasi secara efektif dan efisien sehingga indikator cakupan layanan irigasi dapat terlayani.



Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi

Tabel III.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2. : Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi tahun sebelumnya		Target akhir Renstra	Sumber Data
						2018	2019		
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	%	74,32	67,552	90,89	70,62	67,675	75,79	Bidang Bina Marga
Rata-Rata						Kriteria Tahun 2020 : Baik			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran : Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik dengan indikator Persentase jalan dalam kondisi baik pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan capaian kinerja 90,89% dengan kriteria baik.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

- Indikator Persentase jalan dalam kondisi baik. ;

capaian indikator Persentase jalan dalam kondisi baik. tahun 2020 sebesar 67,552% dengan target 74,32% dimana untuk realisasi capaiannya tidak mencapai target atau kurang dari target yang ditetapkan , sedangkan untuk realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 dengan realisasi capaian indikator persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 67,675% dengan target sebesar 71,85% dimana untuk relisasi capaian kinerja dengan indikator Persentase jalan dalam kondisi baik untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,2% dari capaian kinerja tahun 2019 sedangkan untuk realisasi capaian kinerja tahun 2018 sebesar 68,44% dengan target sebesar 69,74% di lihat dari realisasi capaian dan target tahun 2018, 2019 dan 2020 untuk indikator Persentase jalan dalam kondisi baik belum mencapai target restra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Metode atau cara yang dilakukan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi baik maka dilakukanlah pemeliharaan rutin dan berkala sehingga jalan yang sudah ada bisa mencapai umur rencana dengan kebijakan

mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun.

Faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja tahun 2020 adalah masalah anggaran dimana untuk tahun 2020 terjadi rasionalisasi anggaran/refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid. 19 sehingga beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja tahun 2020 selain faktor anggaran ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi capaian kinerja untuk mempertahankan kondisi jalan tetap dalam kondisi baik yaitu :

1. faktor kondisi fisik tanah di Kabupaten Lombok Tengah terutama di wilayah bagian selatan yang jenis tanahnya berupa tanah liat sehingga umur jalan tidak bertahan lama, tanah ini memiliki sifat mengembang dan menyusut yang tinggi di dimana pada saat musim penghujan tanah akan mengembang dan disaat musim kering tanah akan menyusut.
2. Banyaknya kendaraan angkutan barang yang melalui jalan dengan melebihi tonase jalan.



**Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
Jalan Kabupaten**

Tabel III.2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.3. Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi tahun sebelumnya		Target akhir Renstra	Sumber Data
						2018	2019		
1.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	%	80	78,16	98	83.38	90.18	82	Bidang Cipta Karya
Rata-Rata						Kriteria Tahun 2020 : Baik			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran : Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih dengan indikator persentase rumah tangga yang terlayani air bersih pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan capaian kinerja 98% dengan kriteria baik.

Adapun penjelasan indikator diuraikan sebagai berikut:

- Indikator Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih :

capaian indikator Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih tahun 2020 sebesar 78,16% dengan target 80%, sedangkan pada tahun 2019 realisasi capaian indikator rumah tangga yang terlayani air bersih sebesar 90,18% dengan target sebesar 78% dengan capaian kinerja sebesar 115,62% sedangkan untuk target akhir Renstra sebesar 82% itu berarti bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2019 sudah mencapai target sedangkan untuk tahun 2020 realisasi belum mencapai target.

Metode ataupun cara yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja yaitu Menyediakan sarana dan prasarana air bersih untuk mempermudah masyarakat mengakses air bersih dengan menyediakan jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan selain itu juga dengan Melakukan konservasi sumber mata air yang ada. Kebijakan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih yaitu Penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat. Pada tahun anggaran 2020 faktor anggaran sangat mempengaruhi realisasi

capaian kinerja karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan pandemic Covid. 19 sehingga kegiatan di tahun 2020 ditunda pelaksanaannya dan diusahakan untuk di anggarkan di tahun berikutnya selain faktor anggaran faktor alam pada saat ini sangat mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja seperti pada tahun 2020 kita mengalami musim kemarau panjang yang menyebabkan berkurangnya debit air yang berasal dari sumber mata air yang menyebabkan pendistribusian air ke masyarakat berkurang.



Kegiatan
Pemasangan Pipa
Sumur Bor

Tabel III.2.4. . Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.4. Ketaatan terhadap RTRW

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi tahun sebelumnya		Target akhir Renstra	Sumber Data
						2018	2019		
1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	82,54	81,04	98	80.32	81,40	86.71	Bidang Tata Ruang
Rata-Rata						Kriteria Tahun 2019 : Baik			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran : Ketaatan terhadap RTRW dengan indikator Persentase ketaatan terhadap RTRW, pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan capaian kinerja 98%, dengan kriteria baik .

Adapun penjelasan indikator diuraikan sebagai berikut :

- Indikator Persentase ketaatan terhadap RTRW .

Target tahun 2020 sebesar 82,54% dengan capaian/realisasi sebesar 81,04% sedangkan untuk tahun 2019 capaian/realisasi sebesar 81,40% dengan target sebesar 80,32%. Untuk indikator Persentase ketaatan terhadap RTRW dengan target akhir renstra tahun 2021 sebesar 86.71%.

Metode atau cara yang dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja adalah dengan melakukan kegiatan sosialisai sehingga akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang sehingga terkendalinya pemanfaatan ruang oleh masyarakat dengan Kebijakan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Faktor-faktor yang yang mempengaruhi capaian kinerja adalah karena adanya rasionalisasi anggaran/refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid.19 selain masalah anggaran pandemi Covid. 19 juga berdampak signifikan dalam pencapaian realisasi kinerja untuk indikator Persentase ketaatan terhadap RTRW, beberapa kegiatan di bidang tata ruang ditunda pelaksanaannya karena adanya aturan tentang social

distancing (pembatasan sosial) hal ini sangat mempengaruhi beberapa kegiatan seperti kegiatan sosialisasi dan kegiatan pembahasan rencana tata ruang lainnya.

Tabel 3.2.5. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.5. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan urusan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi tahun sebelumnya		Target akhir Renstra	Sumber Data
						2018	2019		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10.
1.	Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR)	Nilai	B	CC	-	C	C	B	
Rata-Rata						Kriteria Tahun 2019 : Cukup			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan urusan dengan indikator Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR) pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan capaian kinerja C dengan kriteria cukup.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut :

- Indikator Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR):

capaian indikator Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR tahun 2020 dengan nilai CC sedangkan target tahun 2020 adalah nilai B, untuk capaian kinerja tahun 2020 belum bisa mencapai target dimana Indikator kinerja Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR) target akhir renstra tahun 2021 dengan nilai B.

Metode ataupun cara yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai target Nilai SAKIP SKPD dengan nilai B maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah harus memperbaiki sistem penyusunan pelaporan kinerjanya menjadi lebih baik dengan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang disusun dengan disertai dengan data-data pendukung yang dibutuhkan, untuk menghasilkan laporan yang berkualitas maka harus ada kerjasama dan dukungan dari masing-masing bidang dengan membentuk tim penyusunan

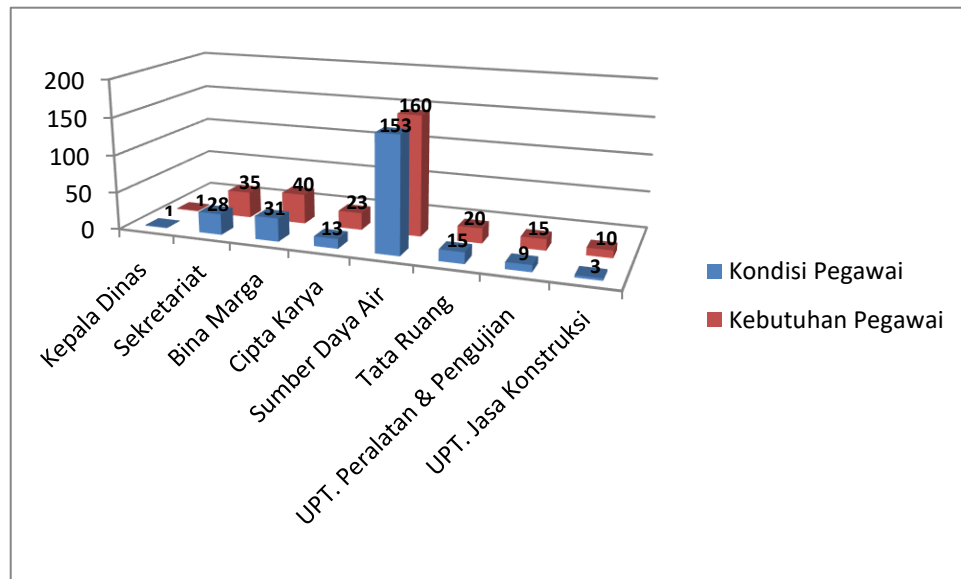
laporan kinerja dimana timnya terdiri dari Subbag. Perencanaan sebagai koordinator dengan anggota seksi perencanaan teknis masing-masing bidang dengan demikian maka akan menghasilkan suatu laporan yang berkulitas dan akuntabel. Faktor –faktor lain yang mempengaruhi capaian kinerja dengan indikator kinerja Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR) adalah adanya keinginan dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan nilai B untuk Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga mendorong SKPD untuk meningkatkan kualitas Laporannya.

III.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

III.3.1. Analisis Efisiensi SDM dan Aset

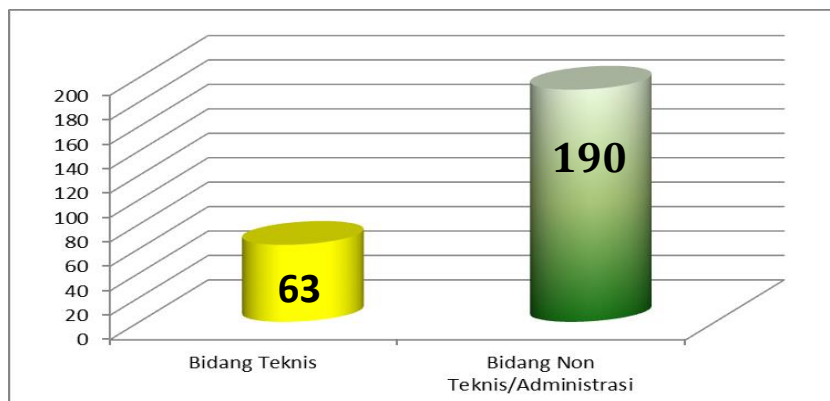
Pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut :

Tabel. III.3.1. Kebutuhan Pegawai berdasarkan kebutuhan



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang masih mengalami kekurangan pegawai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada akan melaksanakan tugas dan fungsi yag lebih besar serta tanggung jawab dan beban kerja yang dimiliki.

Tabel III.3.2. Tabel pegawai berdasarkan Bidang



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 memiliki pegawai sebanyak 253 orang yang terdiri dari 63 orang pegawai tenaga teknis dan sebanyak 190 orang tenaga non teknis/adminitrasi, sedangkan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Dinas Teknis maka kalau kita lihat dari keadaan pegawainya sangat berbanding terbalik dari jumlah tenaga teknis dan non teknisnya. Untuk dapat melaksanakan kegiatan guna mendukung meningkatkan capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Dinas teknis seharusnya memiliki tenaga teknis sebesar 65% dari jumlah pegawai keseluruhan.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi juga oleh kondisi asset yang dimiliki. Adapun asset yang dimiliki Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. III.3.3. Jenis dan Nilai Aset

No	Jenis Aset	Nilai	Jumlah Item
		RP.	
1.	KIB A	118.884.942.82	236
2.	KIB B	16.485.934.69	673
3.	KIB C	90.089.413.52	310
4.	KIB D	1.825.079.749.96	1.843
5.	KIB E	42,687.50	6
JUMLAH		2.050.582.728.486.70	3.068

Jumlah asset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.4. Aset Dalam Kondisi Baik Tidak Digunakan Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai	Jumlah Item
		RP.	
1.	KIB A	-	-
2.	KIB B	-	-
3.	KIB C	-	-
4.	KIB D	-	-
5.	KIB E	-	-
JUMLAH		-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai asset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan efisiensi sumber daya dengan memanfaatkan asset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja SKPD.

III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.III.4.1. Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No	Urain	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Tidak Langsung	15.802.420.545	15.559.930.833	98,47
2.	Belanja Langsung	128.615.770.740	118.650.378.939	92,25
Jumlah		144.078.941.285	134.210.309.772	93,15

Penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 sebesar 93,15% dari anggaran belanja tidak langsung 98,47% dan belanja langsung sebesar 92,25% dari realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah baik atau lebih dari 90%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel.III.4.2. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja tahun 2020

Realisasi						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Rasio ketersediaan debit air irigasi	Cakupan layanan Irigasi	13.123,35	13.123,35	100	Program Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	16.125.561.550	13.159.681.690	81,61
		Debit Air	23.108	23.108	100				
2.	Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap	74,32	67,552	90,89	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	25.715.413.972	23.180.032.970	90,14
						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.811.427.500	4.636.151.863	96,35

3.	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	80	78,16	97,70	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	17.329.350.000	16.788.912.397	97,86
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	84,36	81,04	96,06	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	430.522.000	240.640.715	99,43
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR)	B	C	-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.186.732.550	1.026.471.403	86,50
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	240.036.000	165.575.517	68,98
						Program Penyediaan Sarana Prasaran	62.598.236.168	59.100.554.872	94,41

						Gedung Kantor			
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	178.491.000	174.562.750	97,80

Berdasarkan data dalam tabel tersebut diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

BAB IV

P E N U T U P

Sesuai dengan PERMENPAN No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah merampungkan penyusunan LKj-IP Tahun 2020

LKj-IP ini merupakan evaluasi kinerja terhadap masing-masing Unit kerja/bagian dalam penyelenggaraan Tufoksinya sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD. Selain itu pula, merupakan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan realisasi anggaran dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020. Dimana penyelenggaraan program/kegiatan yang dimaksud merupakan penjabaran visi, misi dan strategi organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

Berdasarkan pengkajian terhadap ketiga aspek tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2020 dikategorikan baik.

Dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dimana di masa pandemi ini pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran yang difokuskan ke penanganan Covid. 19 sehingga pelaksanaan beberapa program dan kegiatan harus tertunda pelaksanaannya yang menyebabkan capaian realisasi kinerja tidak mencapai target yang sudah ditetapkan di Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Namun demikian untuk kedepannya perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan melalui peningkatan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk itu dokumen LKj-IP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 3 (tiga) fungsi utama Pemerintahan Daerah yaitu Pembangunan, Pemberdayaan dan Pelayanan Publik.

LAMPIRAN

